

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. *Hukum Administrasi Negara dan Good Governance*. Surakarta: UNS Press, 2017
- Indriyanto Seno Adji. *Kejaksaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Diadit Media, 2015
- Jimly Asshiddiqe. *Konstitusi dan Negara Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2017.
- , *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2018
- Leden Marpaung. *Kejaksaan Republik Indonesia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mahfud M.D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press,
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- , *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2017.
- Muchsan. *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2016.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- M Faal. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

- Philipus M Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- , *Kewenangan Pemerintahan dan Tanggung Jawab Negara*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2008.
- , *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2015
- Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016.
- Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Indriyanto Seno Adji. *Kejaksaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Diadit Media, 2015.
- , *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2009.
- , *Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial*. Bandung: Alumni, 2010.
- Soehino. *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1988.
- Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley: University of California Press, 1978.

B. JURNAL ILMIAH

- Mustofa, Ahmad. "Analisis Fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 51, No. 3 (2021): 482–500.
- Pratiwi, Indah Sari. "Kedudukan Jaksa Pengacara Negara dalam Sengketa Tata Usaha Negara." *Jurnal Yudisial* Vol. 13, No. 1 (2020): 45–60.
- Rosyada, Dede. "Efektivitas Jaksa Pengacara Negara dalam Perlindungan Aset Negara." *Jurnal RechtsVinding* Vol. 10, No. 2 (2021): 185–198.
- Suhardin, Yohanes. "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Putusan PTUN." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 26, No. 3 (2019): 401–420.

Yusuf, Asep Warlan. "Peran Preventif Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik." *Mimbar Hukum* Vol. 32, No. 2 (2020): 267–281.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6747).

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan-putusan terkait legal standing Jaksa Pengacara Negara dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, diakses melalui *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 62 PK/TUN/2016 tentang Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Tata Usaha Negara.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-025/A/JA/11/2015

tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan, Bantuan, Pertimbangan, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-018/A/J.A/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Pengacara Negara.

Putusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-152/A/JA/10/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara.

D. JURNAL, TESIS, INTERNET

“Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Pembubaran Perseroan Terbatas.” *Nomos: Jurnal Hukum dan Politik*, (2025). Diakses dari <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/3366> (akses 13 Nov 2025).

Andi Saputra, 2019, *Analisis Hukum terhadap Kedudukan Jaksa Pengacara Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 61. <https://repository.usu.ac.id/>

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Aset Negara Tahun 2021. Jakarta: BPK RI, 2021.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Laporan Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2020. Jakarta: BPKP RI, 2020.

Batubara, R. W. S., Subaidi, J., & Muksalmina. (2025). Penerapan asas *dominus litis* oleh jaksa penuntut umum dalam tindak pidana umum berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (JIM-FH)*, 8(3). doi:10.29103/jimfh.v8i3.22997.

Cahayo, R.G. (2025). Implementasi Peran Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Kasus Perdata: Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)*, 5(3)[pdf]. Diakses dari <https://sosains.greenvest.co.id/index.php/sosains/article/download/32077/1739>

Dian Permatasari, 2021, *Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Pemulihan Kerugian Keuangan Negara melalui Mekanisme Non-Litigasi*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, hlm. 59. <https://repository.ugm.ac.id/>

- Dimas Prasetyo, 2024, *Evaluasi Efektivitas Jaksa Pengacara Negara dalam Penegakan Prinsip Good Governance di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Universitas Trisakti, hlm. 58. <https://repository.trisakti.ac.id/>
- Fitria Hapsari, 2020, *Efektivitas Jaksa Pengacara Negara dalam Menangani Perkara Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Surabaya*, Surabaya: Universitas Airlangga, hlm. 53. <https://repository.unair.ac.id/>
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Laporan Kinerja Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Tahun 2023. Jakarta: Kejaksaan RI, 2023. Diakses dari: <https://www.kejaksaan.go.id>
- Kejaksaan Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Tahun 2023*. Diakses dari: <https://www.kejaksaan.go.id>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Peraturan Perundang-undangan*. Diakses dari: <https://peraturan.go.id>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Diakses dari: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Nur Aini, 2022, *Optimalisasi Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Perlindungan Aset Daerah Melalui Pendampingan Hukum di Pemerintah Daerah*, Malang: Universitas Brawijaya, hlm. 67. <https://repository.ub.ac.id/>
- Rudi Hartono, 2023, *Implementasi Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Bidang Perdata dan TUN Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 006/A/JA/07/2017*, Makassar: Universitas Hasanuddin, hlm. 72. <https://repository.usu.ac.id/>
- Siregar, R. M. S., Zulfan, & Herinawati. (2024). Tinjauan yuridis putusan hakim di bawah tuntutan jaksa penuntut umum dalam tindak pidana narkoba (Studi Putusan Nomor: 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (JIM-FH)*, 7(2).
- Sitepu, Adenan, Sulaiman Sulaiman, dan Yulia Yulia, *Implementasi Tugas Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam Menyelesaikan Kasus Perdata di Luar Pengadilan (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah)*, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 12, no. 1 (13 nov 2025): 144-158, <https://ojs.unimal.ac.id/suloh/article/view/15291>
- Sri Rahayu, 2018, *Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Perdata untuk Melindungi Aset Negara di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah*, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 45–46.

<https://repository.unnes.ac.id>

World Bank. *Administrative Justice and Public Governance*. Washington D.C.:
World Bank, 2020. Diakses dari: <https://www.worldbank.org>